

newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 149, Desember 2021



US DASAR
GSA:
ASILA,
RI 1945,
BHINNEKA
KA DAN



Gubernur Lemhannas RI Berikan Pengantar Pimpinan kepada Peserta Pelatihan untuk Pelatih	2
Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik ...	3
FGD Intellectual Exercise Jelang Pilkada Serentak 2024 ...	4
Audiensi Perhimpunan Indonesia Tionghoa Dengan Lemhannas RI.....	5
Sosialisasi Teknik Penyusunan Peraturan di Lingkungan Kementerian dan Lembaga	6
Gubernur Lemhannas RI Jadi Narasumber ALPI	7
Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-Lapor!	8
Penutupan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan serta Pelatihan Untuk Pelatih Secara Virtual	9
Webinar Strategi Penanganan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19	10
Lemhannas RI Turut Hadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional	11
Lemhannas RI Menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT. Bumi Laut Shipping Services	12

Penutupan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan serta Pelatihan Untuk Pelatih Secara Virtual

Gubernur Lemhannas RI Berikan Pengantar Pimpinan kepada Peserta Pelatihan untuk Pelatih



Selasa, 16 November 2021

Peserta Pelatihan untuk Pelatih/*Training of Trainers* Lemhannas RI menerima Pengantar Pimpinan dari Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjono pada Selasa (16/11) secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya para peserta untuk bisa meningkatkan peran mereka sebagai pelaksana pembentukan perubahan.

Peserta yang merupakan pelatih dan pengajar, memiliki fungsi untuk mengubah peserta didik yang tadinya belum memahami atau pemahamannya lemah menjadi memahami nilai-nilai wawasan kebangsaan sehingga nantinya dapat menjadi agen nilai-nilai wawasan kebangsaan dengan mentransformasikan inti dari Empat Konsensus Dasar Kebangsaan kepada peserta didiknya masing-masing

Selain itu, para peserta Pelatihan untuk Pelatih/*Training of Trainers*

Lemhannas RI mampu menjalankan metode pendidikan ataupun pelatihan yang lebih mengoptimalkan partisipasi peserta didik. "Para pelatih dan pengajar nantinya akan melaksanakan tugasnya untuk membekali peserta didik dengan metodologi yang berpusat kepada peserta," ucap Gubernur Lemhannas RI.

Menurut Gubernur, tata cara konvensional dimana peserta didik yang berperan pasif sudah harus mulai ditinggalkan. Saat ini peserta didik harus berperan aktif untuk turut serta berpikir dan dilatih untuk bisa memiliki kemampuan berpikir dan menganalisis secara kritis. "Berpikir kritis adalah termasuk pondasi yang Lemhannas RI gunakan untuk memberikan pembekalan kepada para peserta didik," ujar Gubernur Lemhannas RI.

Gubernur berharap para peserta yang mengikuti Pelatihan untuk Pelatih/*Training of Trainers* Lemhannas RI dapat konsisten terhadap komitmennya pada

Empat Konsensus Dasar Bangsa. Para pelatih yang nantinya menjadi alumni diharapkan tidak sekedar menghafal atau mengucapkan pengertian secara lisan saja tapi juga mampu mencerminkannya dalam bentuk perilaku sehari-hari.

Nantinya, para alumni diharapkan berkomitmen untuk memegang teguh Pancasila dan sanggup mengimplementasikannya serta bertanggung jawab untuk senantiasa berpegang teguh menerapkan pasal-pasal yang terkandung dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Selain itu dalam konteks NKRI, alumni diharapkan memiliki kompetensi dan keteguhan hati untuk mengutamakan kepentingan nasional, bangsa, dan negara dengan menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah. Para alumni juga diharapkan memiliki kompetensi dan komitmen untuk senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan ragam budaya, agama, etnik, bahasa dan golongan.



Rabu, 17 November 2021

Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, Lemhannas RI menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Rabu (17/11) secara virtual. Hal ini terselenggara guna mendukung komitmen Lemhannas RI dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan serta menyosialisasikan urgensi dan pentingnya pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si yang membuka kegiatan sosialisasi tersebut, dalam sambutannya mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Hadir sebagai narasumber yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Arif Adi Kuswardono dan Tenaga Ahli KIP Agus Wijayanto Nugroho.

Komisioner KIP menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik seringkali disalahartikan karena banyak pihak beranggapan bahwa Keterbukaan Informasi Publik hanya terkait tugas humas atau penerangan serta pers freedom. Padahal cakupannya jauh lebih luas dan mendalam. "Keterbukaan Informasi Publik adalah pemenuhan hak publik atas informasi dilakukan dengan transparansi pengelolaan badan publik melalui mekanisme manajemen informasi," jelas Komisioner KIP.

Lebih lanjut, Komisioner KIP menekankan bahwa mekanisme manajemen informasi merupakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Oleh karena itu, tugas PPID lebih kompleks dari tugas kehumasan umum, karena harus menciptakan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan kebijakan yang berada pada badan publik tempat PPID tersebut bernaung. "Informasi dari badan publik merupakan hal penting karena keterbukaan informasi diakomodasi dalam UU 14 Tahun 2008, berkaitan dengan *open government* dan *good governance* yang menjadi *platform* dari

pemerintahan modern, demokratis, dan mensejahterakan masyarakat," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Tenaga Ahli KIP Agus Wijayanto Nugroho menjelaskan bahwa dalam struktur kelembagaan PPID yang diatur dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021, PPID bisa melekat pada PPID utama dan pada masing-masing unit kerja Eselon I dapat ditugaskan PPID Pelaksana. "Untuk pengelolaan layanan informasi bisa diberikan oleh PPID Pelaksana, tetapi harus tetap dalam koordinasi PPID," ucap Tenaga Ahli KI Pusat.

Menutup Sosialisasi tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. menyampaikan bahwa Lemhannas RI terus berupaya untuk berinovasi dan berkolaborasi guna meningkatkan kualitas implementasi keterbukaan informasi publik. "Segala upaya yang dilakukan perlu untuk terus diiringi dengan komitmen tinggi dan dukungan dari pimpinan serta seluruh personel Lemhannas RI," pungkasnya.

FGD Intellectual Exercise Jelang Pilkada Serentak 2024

Kamis, 18 November 2021

Lemhannas RI menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) *Intellectual Exercise* (IE) dengan judul “Menyoal Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Daerah Jelang Pilkada Serentak 2024”, pada Kamis (18/11). Hadir dalam FGD tersebut empat narasumber, yakni Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Andi Bataralifu, M.Si., Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Dr. Hendri Budi Satrio, CIGS, dan Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, M.Si.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa tema kajian sangat menarik karena mengandung cakupan yang sangat luas baik secara horizontal maupun vertikal. Cakupan horizontal terkait rujukan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai objek yang dilihat dari berbagai perspektif pemangku kepentingan. Secara vertikal karena pada akhirnya persoalan pengangkatan pejabat sementara kepala daerah perlu didasarkan pada cara pandang kenegarawanan yang berujung pada kepentingan nasional.

Lebih lanjut Gubernur juga menyampaikan beberapa alasan dipilihnya isu tersebut untuk dikaji. Pertama, adanya lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk objek dan keadaan yang sama. Kedua, lamanya waktu yang tersedia bagi para pejabat sementara dapat digunakan, dalam kewenangannya, untuk membuat kebijakan yang bisa berpotensi berlawanan dengan kepentingan nasional.

Ketiga, melihat dari praktik politik selama ini, pengisian lowongan jabatan guna diisi sebagai pejabat sementara



Pada akhirnya kita ingin mewujudkan keadaan yang kondusif bagi kesinambungan kepemimpinan politik pada tingkat daerah dan pusat bagi terwujudnya kepentingan nasional”

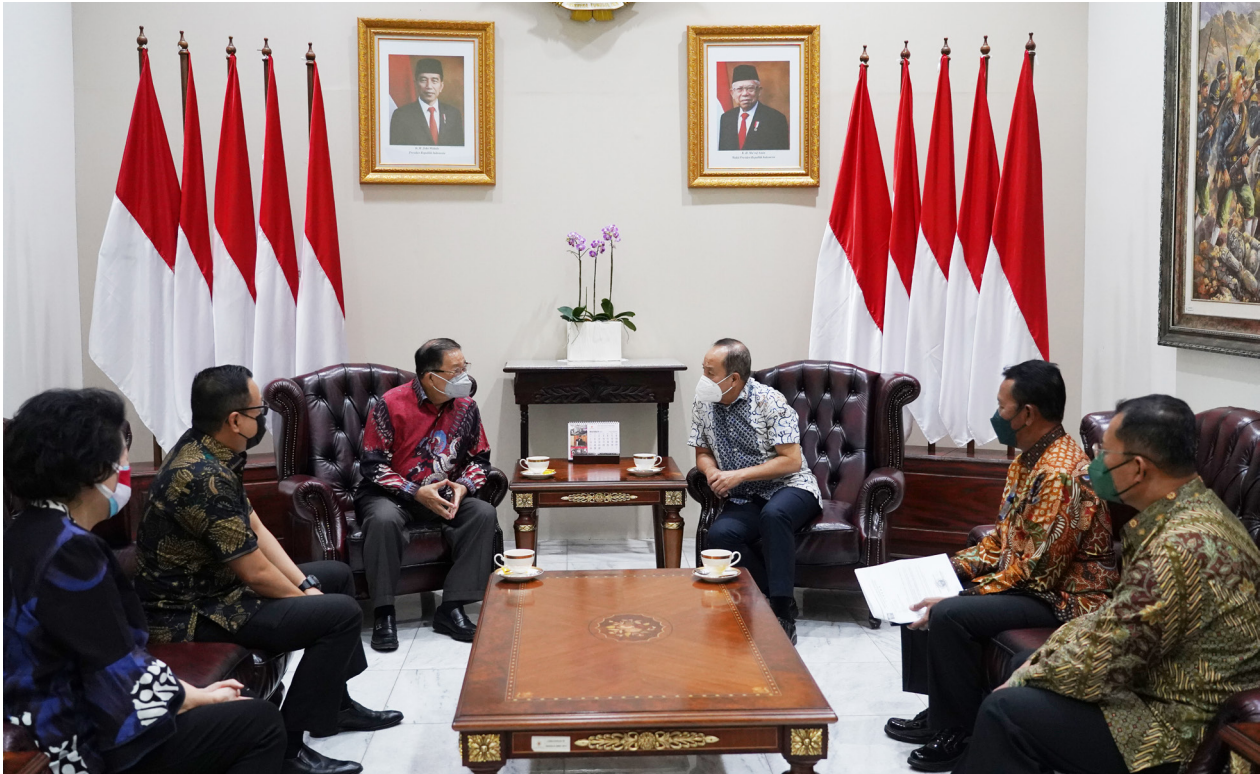
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

dapat menjadi lahan tarik ulur berbagai kepentingan politik partisan. Keempat, keadaan seperti ini dapat melahirkan

kondisi stabilitas yang tidak kondusif dalam berbagai aspek guna mewujudkan keberlangsungan tongkat estafet kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah.

Oleh karena itu, Gubernur menyampaikan bahwa FGD tersebut digunakan dan bertujuan untuk melahirkan berbagai ide dan pemikiran yang strategis, guna terciptanya rekomendasi terbaik dalam mencari kriteria pejabat kepala daerah yang kompeten dan netral. “Terlepas dari semua komplikasi yang disebutkan tadi, bisa sepakati bahwa pada akhirnya kita ingin mewujudkan keadaan yang kondusif bagi kesinambungan kepemimpinan politik pada tingkat daerah dan pusat bagi terwujudnya kepentingan nasional,” ujarnya.





Jum'at, 19 November 2021

Audiensi Perhimpunan Indonesia Tionghoa Dengan Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima audiensi dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) pada Jumat (19/11) di Ruang Tamu Gubernur, Lemhannas RI. Kedatangan INTI tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Teddy Sugianto dan didampingi Sekretaris Jenderal Ulung Rusman, Wakil Sekretaris Jenderal Candra Jap, Bendahara Umum Nurjati Tanuwidjaja, dan Wakil Ketua Bidang Lexyndo Hakim.

Dalam audiensi tersebut, pihak INTI menyampaikan bahwa masa kepengurusan 2017-2021 yang dipimpin Teddy Sugianto akan segera berakhir. Oleh karena itu, pengurus INTI menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama ini.

Saat ini kemajuan teknologi dan informasi sangat dominan dan pesat,

kesempatan generasi muda untuk menerima referensi terkait informasi sangat luas dan mudah. Namun, referensi informasi tersebut tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan, hal ini yang menjadi keresahan pengurus INTI.

Sejalan dengan hal tersebut, sarana mentransformasikan nilai-nilai kebangsaan sangat terbatas dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI dinilai menjadi salah satu jalan keluar. Kerja sama antara INTI dan Lemhannas RI diharapkan terus terjalin agar nilai-nilai kebangsaan dapat diberikan oleh Lemhannas RI kepada generasi muda INTI. "Generasi yang akan datang harus mengerti Pancasila dan NKRI, jangan lupa itu," ujar Ketua Umum INTI.

Salah satu bentuk kerjasama antara INTI dan Lemhannas RI yang telah terlaksana adalah pada tahun 2018

sebanyak 100 anggota INTI diberikan kesempatan mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI.

"Kerja sama sudah bagus, tinggal dilanjutkan saja itu," sambung Gubernur Lemhannas RI. Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa jika ada kerangka kerja sama yang perlu diperbaharui, bisa dilakukan dalam koordinasi lanjutan antara Lemhannas RI dengan pengurus INTI selanjutnya sehingga dapat mewujudkan komitmen bersama untuk menyebarkan nilai-nilai luhur kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Turut hadir mendampingi Gubernur Lemhannas RI pada audiensi tersebut Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc. dan Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han.

Sosialisasi Teknik Penyusunan Peraturan di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

Selasa, 23 November 2021

Lemhannas RI mengadakan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Peraturan di Lingkungan Kementerian dan Lembaga pada Selasa (23/11). Hadir dalam sosialisasi tersebut Adharinalti, S.H, M.H. Kepala Bidang Penyusunan Naskah Akademik Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham RI.

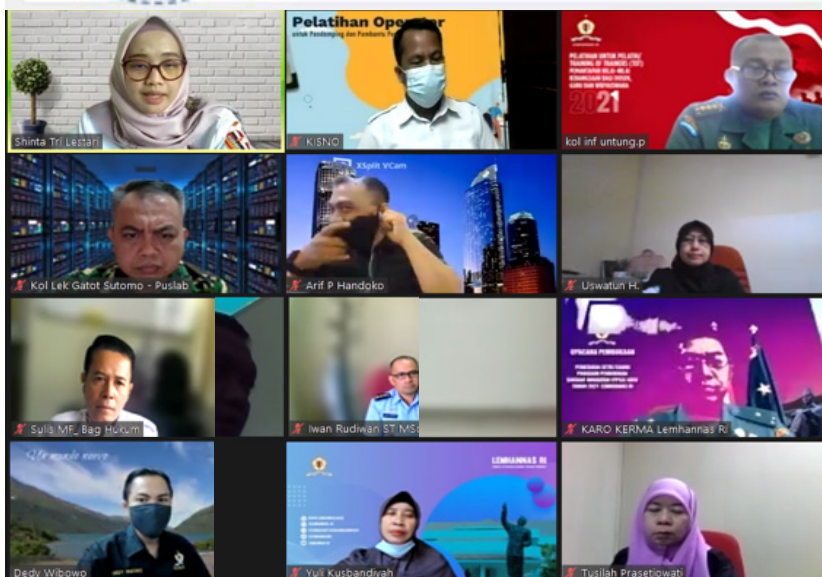
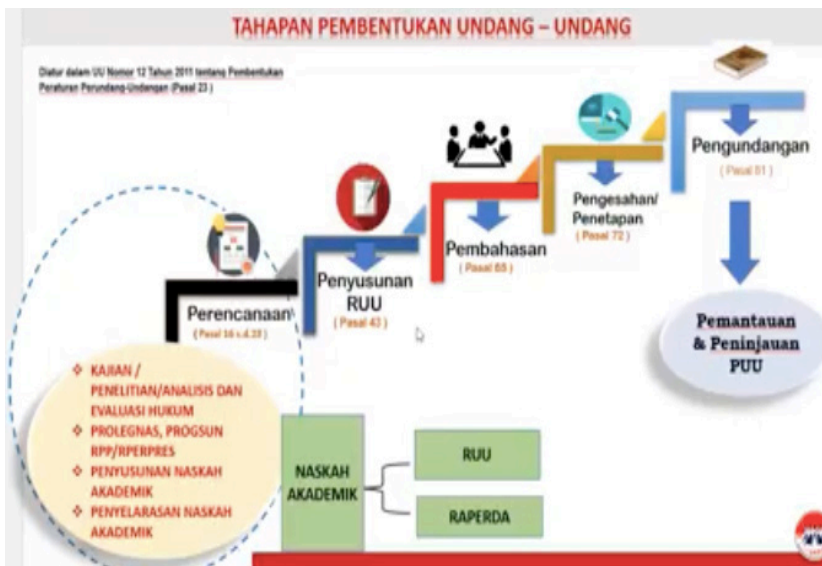
"Keberhasilan suatu kementerian dan/atau lembaga dalam menghasilkan suatu produk hukum atau peraturan dapat dilihat dari sejauh mana proses penyusunan produk hukum atau peraturan dilakukan melalui mekanisme yang benar sesuai dengan teknik pembentukan peraturan," kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP membuka sosialisasi tersebut.

Sampai dengan saat ini, Lemhannas RI sudah banyak menghasilkan produk hukum atau peraturan berupa peraturan gubernur yang sifatnya mengatur internal lembaga. Namun, terkait dengan kualitas produk hukum atau peraturan tersebut, masih diperlukan proses pembelajaran yang lebih komprehensif dan mendalam terutama dalam proses atau teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dilaksanakan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Peraturan di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. "Diharapkan para personel Lemhannas RI mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bisa dijadikan rujukan dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Lemhannas RI," ucap Kepala Biro Kerja Sama Lemhannas RI.

Sementara dalam penjelasannya, Kepala Bidang Penyusunan Naskah Akademik Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham RI Adharinalti, S.H, M.H. mengatakan bahwa pegangan selama melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik ditingkat perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengumuman, bahkan sampai di pemantauan dan peninjauan adalah konsitusi UUD NRI Tahun 1945.

Sementara Kepala Bidang Penyusunan Naskah Akademik Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham RI menjelaskan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) baik yang diusulkan Presiden maupun DPR. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, kekuasaan membentuk Undang-undang berada di DPR, tetapi Presiden berhak untuk mengajukan RUU ke DPR. Dijelaskan juga bahwa dalam menyusun satu RUU harus mengikuti Lampiran II UU 12 Tahun 2011 yang mengatur cara melakukan pembentukan Rancangan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.



Gubernur Lemhannas RI Jadi Narasumber ALPI



Selasa, 23 November 2021

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi narasumber dalam *Accelerated Leadership Program For Pelabuhan Indonesia (ALPI)* pada Selasa (23/11) di Museum Maritim Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan kepada seluruh peserta untuk fokus meningkatkan efektivitas kepemimpinan pasca merger Pelindo I sampai dengan Pelindo IV.

Dalam paparannya, Gubernur Lemhannas RI menyinggung mengenai efektivitas kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja dalam rangka pembangunan budaya yang bersifat *output oriented*. Menurutnya, hal tersebut perlu segera dilakukan untuk membangun daya saing dalam bersaing dengan berbagai perusahaan sejenis dari negara-negara lain di dunia.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa dalam organisasi berisikan anggota-anggota yang memiliki latar belakang berbeda, harus disatukan dalam sebuah visi dan misi organisasi serta dapat dicapai melalui komunikasi yang tepat. "Kalau bicara tentang kepemimpinan, maka pembangunan keadaan yang kondusif bagi sebuah proses perubahan tidak hanya bisa dituntutkan dari pengikut, tetapi juga untuk dibangun oleh pemimpin. Itu yang menyebabkan

komunikasi itu lancar," ungkapnya.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa pemimpin harus mampu membangun kepercayaan dalam lingkup organisasi. Dengan terbukanya pintu komunikasi, setiap pemimpin juga harus bisa memperhatikan tempat, waktu, serta dengan siapa berkomunikasi. Karena setiap situasi membutuhkan cara komunikasi yang berbeda dan melalui komunikasi akan terbangun praktik kepemimpinan yang konkret. "Kita harus belajar mencari bentuk yang konkret, jangan hanya bicara pada tataran idealistis, pada tataran jargon, hanya pada tataran tagline," ujarnya.

Terkait dengan daya saing yang disinggung sebelumnya, Gubernur menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu yang dapat dilakukan dalam meningkatkan daya saing adalah dengan melakukan introspeksi diri dan mempelajari potensi yang dimiliki. "Yang terpenting adalah kemampuan secara jujur untuk melakukan introspeksi," ucapnya.

Gubernur menekankan bahwa memang dalam melakukan introspeksi atas kekurangan yang dimiliki bukanlah hal yang nyaman untuk dilakukan. Namun menurutnya, semakin adanya kejujuran dalam melakukan introspeksi dan menilai diri sendiri, maka semakin besar

peluang untuk melakukan lompatan untuk mengatasi kekurangan dan bermuara pada terciptanya daya saing. "Membangun daya saing, walaupun orientasinya itu adalah keluar bersaing dengan negara lain, langkah pertamanya adalah mengadakan inventarisasi *strength, weakness, opportunity, dan threat* diri sendiri," pungkasnya.



Kalau bicara tentang kepemimpinan, maka pembangunan keadaan yang kondusif bagi sebuah proses perubahan tidak hanya bisa dituntutkan dari pengikut, tetapi juga untuk dibangun oleh pemimpin. Itu yang menyebabkan komunikasi itu lancar

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-Lapor!



Rabu, 24 November 2021

Lemhannas RI menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor!) pada Rabu (24/11) secara virtual. Hadir sebagai narasumber sosialisasi tersebut adalah Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Drs. Yanuar Ahmad, MPA dan Analis Pengaduan Masyarakat Kemenpan RB Alfian Afan.

"Lemhannas RI sebagai salah satu instansi pemerintah, wajib mengelola SP4N-Lapor! sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan pelayanan publik," kata Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si. saat membuka sosialisasi tersebut. Kewajiban tersebut merupakan amanat Pasal 36 dan 37 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengharuskan setiap penyelenggara pelayanan publik menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB Drs. Yanuar Ahmad, MPA menjelaskan bahwa SP4N-Lapor! memiliki prinsip "no wrong door

policy" yang berarti hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Sampai saat ini SP4N-Lapor! dikelola oleh lima pihak yakni Kemenpan RB, Kemendagri, Kominfo, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia.

"Pengelolaan pengaduan ditujukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," kata Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB. Lebih lanjut, Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB menyampaikan bahwa pengaduan merupakan hanya salah satu bagian dari aspek-aspek pelayanan publik.

"Banyak yang menganggap bahwa pengaduan ini berada di ujung dari penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, sebenarnya pengaduan ini merupakan bahan utama dari peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB. Ada tiga hal yang dapat terlihat dengan adanya pengaduan dari masyarakat, yakni hak dari masyarakat, evaluasi, dan klarifikasi.

Sementara, Analis Pengaduan Masyarakat Kemenpan RB Alfian Afan yang juga menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut, menjelaskan mengenai rencana aksi pengelolaan

pengaduan tingkat instansi. Analis Pengaduan Masyarakat Kemenpan RB menekankan bahwa setiap instansi, sesuai dengan amanat peta jalan SP4N-Lapor!, harus menyusun rencana aksi sesuai dengan cita-cita peta jalan untuk mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya.

"Cita-cita ini tentu secara kumulatif dari seluruh instansi yang mengolah SP4N-Lapor!. Tidak merupakan tanggung jawab admin pusat atau 5 instansi saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama oleh seluruh instansi yang mengolah SP4N-Lapor!, tidak terkecuali Lemhannas RI," kata Analis Pengaduan Masyarakat Kemenpan RB.

Kepala Biro Humas Lemhannas RI, Brigadir Jenderal TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. yang menutup sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa Lemhannas RI sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembenahan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-Lapor!. "Tentunya pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-Lapor! yang baik dapat diraih dengan dukungan dan komitmen dari pimpinan dan dari seluruh personel Lemhannas RI," pungkasnya.

Penutupan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan serta Pelatihan Untuk Pelatih Secara Virtual



Senin, 29 November 2021

Dilaksanakan mulai 8 Juni 2021 sampai dengan 24 November 2021, kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan serta Pelatihan Untuk Pelatih/*Training of Trainers* (TOT) Secara Virtual Lemhannas RI Tahun 2021 resmi ditutup pada Senin (29/11) di Ruang Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Profesi diikuti sebanyak 400 peserta yang dibagi dalam empat gelombang dan seluruhnya dinyatakan lulus. Sedangkan, kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dosen, Guru

dan Widyaiswara diikuti sebanyak 400 peserta dalam empat gelombang dan dinyatakan lulus sebanyak 390 peserta.

Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual tersebut diisi dengan rangkaian kegiatan yang dikemas dalam bentuk ceramah, diskusi panel, diskusi kelompok, diskusi antarkelompok, pendalaman materi dan praktek mengajar secara virtual. Seluruh rangkaian tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan para peserta yang kini telah menjadi alumni.

“Perlu disadari bahwa sebagai bagian dari proses pembangunan karakter bangsa, Pemahaman Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa merupakan proses panjang dan perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat menutup kegiatan tersebut.

Dalam upacara penutupan yang dilakukan secara hybrid dan menerapkan protokol kesehatan tersebut, Gubernur meyakini bahwa walaupun dalam waktu yang relatif singkat, para alumni telah memahami dan menyadari arti penting nilai-nilai kebangsaan bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan demokratis. Mengingat dampak negatif kehidupan berbangsa saat ini, Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa hal

tersebut perlu disikapi dan diselesaikan dengan cara cerdas berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebangsaan yang bercirikan semangat gotong royong dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

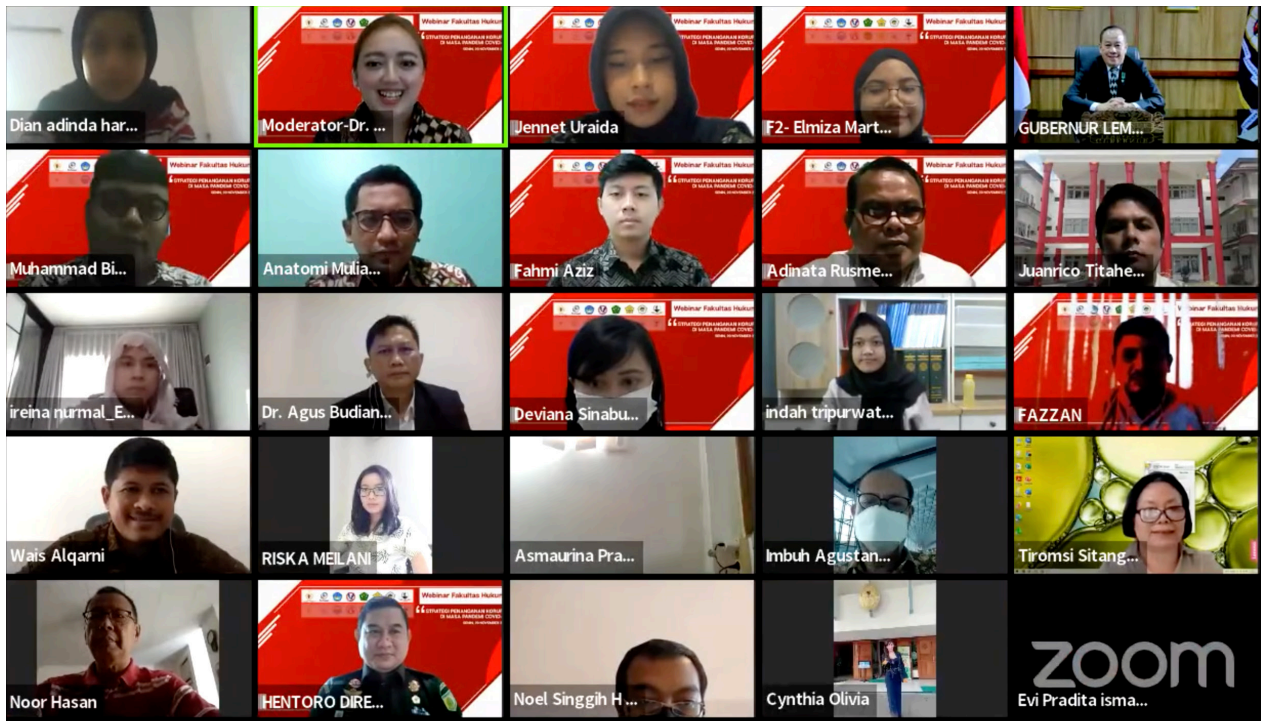
“Kebhinnekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya mampu kita kelola menjadi faktor penguat tata nilai dan tata kehidupan yang lebih baik bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat,” kata Gubernur. Oleh karena itu, diharapkan materi-materi yang telah diterima selama mengikuti kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan serta Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan mampu memotivasi alumni untuk menjalani peran dan tugas masing-masing dengan senantiasa menjunjung tinggi Empat Konsensus Dasar Bangsa.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur berpesan kepada para alumni yang diharapkan dapat menerapkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki pada metode proses belajar mengajar sebagai elemen masyarakat dan komponen bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan berbekal wawasan kebangsaan yang kuat. “Saya yakin para peserta dapat menjadi panutan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja masing-masing,” pungkasnya.



Kebhinnekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya mampu kita kelola menjadi faktor penguat tata nilai dan tata kehidupan yang lebih baik bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI



Senin, 29 November 2021

Webinar Strategi Penanganan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi pembicara utama dalam Webinar Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang mengangkat tema “Strategi Penanganan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19”, pada Senin (29/11) secara virtual.

Pada paparannya, hal yang menjadi perhatian dari Gubernur adalah fenomena korupsi telah yang masuk ke berbagai tempat dan sendi kehidupan masyarakat, parahnya banyak praktik korupsi yang terjadi pada saat pandemi. Keadaan darurat akibat dari pandemi memerlukan respon darurat yang cepat. Respon darurat cepat dilakukan dengan menggunakan kewenangan diskresi secara sadar dan terencana yang terlaksana dengan tidak mengindahkan tertib administrasi. Keadaan darurat menjadi dalih untuk mengutamakan kecepatan dibanding transparansi yang secara tidak langsung membuka celah potensi praktik korupsi. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa tren kasus korupsi di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat di angka 39,6%.

Gubernur melihat bahwa strategi penanganan korupsi pada masa pandemi Covid-19 tidak berbeda dari penanganan korupsi pada umumnya. Namun,

penanganan korupsi pada masa pandemi Covid-19 tetap perlu memperhatikan ciri-ciri khusus yang berlaku dalam penanganan korupsi di masa pandemi Covid-19. “Keadaan ini menjadi sulit karena kebijakan mengatasi pandemi Covid-19 mengandung tantangan dua sisi persoalan dalam mengatasi pandemi Covid-19, yaitu kesehatan dan ekonomi yang tidak bisa saling dipilih yang mana yang prioritas,” ujarnya.

Kemudian, Gubernur menjelaskan bahwa strategi penanganan korupsi secara umum terutama pada aspek penegakan hukum selalu memberikan kesan represif. Pihak-pihak yang bersinggungan dengan penegakan korupsi dianggap belum memaksimalkan upaya preventif. Dalam hal ini esensi yang dimaksud adalah pengawasan terhadap dana yang dialirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Sangat penting dan mendesak untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 agar kasus-kasus korupsi tidak semakin meningkat dan program-program pemerintah dapat dilaksanakan tepat sasaran,” jelasnya.

Pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan semata. Perlu dibangun sistem anti korupsi yang bisa



Sangat penting dan mendesak untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 agar kasus-kasus korupsi tidak semakin meningkat dan program-program pemerintah dapat dilaksanakan tepat sasaran

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

mendeteksi secara dini perilaku koruptif serta memasifkan pendidikan anti korupsi untuk membangun integritas dan kejujuran di berbagai kalangan. “Saya berharap kegiatan ini bermanfaat dalam menyampaikan pandangan serta pemikiran yang komprehensif dan konkret dalam upaya penanganan korupsi di masa pandemi Covid-19,” pungkask Gubernur.

Lemhannas RI Turut Hadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional

Rabu, 1 Desember 2021



Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. mewakili Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si menghadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021 secara virtual. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut, dibuka pada Rabu (1/12) dan disiarkan langsung dari Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI.

Dilansir dari kemensos.go.id, peringatan HDI setiap tahun adalah untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas, yaitu bahwa peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas dan memberikan sokongan untuk meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan tersebut selaras dengan tema HDI tahun 2021, yakni "Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Menuju Tatanan Dunia yang Inklusif, Aksesibel dan Berkelanjutan Pasca Covid-19".

Dalam rangkaian peringatan HDI tahun 2021, digelar berbagai kegiatan yakni publikasi dan sosialisasi, webinar series, pameran, penyerahan bantuan Atensi, gebyar inklusi, penyuluhan sosial dan melukis, dan acara Puncak HDI tahun 2021 yakni pelantikan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND).

"Hari Disabilitas Internasional bukan sekedar upacara, bukan saja sekedar seremonial," kata Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Tri Rismaharini pada konferensi pers. Menurutnya, Hari Disabilitas Internasional dapat diisi dengan menampilkan karya-karya yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas karena mereka mampu berkarya lebih.

Mensos berharap kedepannya tidak ada lagi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, baik dalam sektor apa pun. Diharapkan semakin adanya kemudahan aksesibilitas dan penyandang disabilitas diberikan fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi disabilitas. "Mimpi saya tidak ada lagi perbedaan, diberikanlah kesempatan kepada mereka," harapnya.

"Saya percaya dibalik kekurangan yang diberikan Tuhan kepada mereka,

pasti Tuhan juga akan memberikan kelebihan yang lain kepada mereka," ungkap Mensos. Diharapkan setiap lapisan masyarakat mulai melihat bahwa jika penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama, maka juga bisa berprestasi.

"Hari Disabilitas Internasional sebenarnya adalah momentum bagi kita semua untuk mengingatkan kembali akan pentingnya bagaimana kita menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas," kata Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut.

Lebih lanjut, Ketua Umum PPDI menyampaikan bahwa tantangan dalam masalah disabilitas bukan hanya mengenai masalah sosial. Namun, ada masalah lainnya juga, salah satunya adalah rendahnya pendidikan. Banyak penyandang disabilitas yang tingkat partisipasi sekolahnya sangat rendah. "Ini masalah bagi negara kita, jika pendidikan yang baik tidak didapatkan maka kedepannya akan sulit untuk mandiri," katanya.



Kamis, 9 Desember 2021

Lemhannas RI Menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT. Bumi Laut Shipping Services

Lemhannas RI menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT. Bumi Laut Shipping Services pada Kamis (9/12) di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Chairman & CEO PT. Bumi Laut Shipping Services Jay A. Singgih, BA, S.H., M.M., MBA.

Ini merupakan kali pertama Lemhannas RI dan PT. Bumi Laut Shipping Services menandatangani nota kesepahaman antara kedua institusi. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, pelaksanaan pengkajian, serta bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama oleh Lemhannas RI dan PT. Bumi Laut Shipping Services.

"Kerja sama yang baru terbangun ini merupakan suatu komitmen bersama baik PT. Bumi Laut Shipping Services dan Lemhannas RI dalam bersinergi dengan membuat program-program kegiatan bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang dapat mendukung kemajuan bangsa," kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Oleh karena itu, penandatanganan nota kesepahaman tersebut tidak hanya sekedar menjadi seremonial semata. Diharapkan nota kesepahaman tersebut dapat diimplementasikan dalam kegiatan yang lebih nyata secara konsisten terkait dengan bidang-bidang yang ada di dalam ruang lingkup yang dikerjasamakan.

Gubernur Lemhannas RI berharap sinergitas antara kedua institusi dapat menjadi salah satu upaya bersama dalam memperkuat wawasan kebangsaan

sebagai prasyarat mutlak dalam membangun Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan memiliki karakter kebangsaan demi terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh. "Potensi yang dimiliki oleh Lemhannas RI dan PT. Bumi Laut Shipping Services dapat saling bersinergi untuk menghasilkan capaian dan sasaran yang lebih optimal," ujarnya.

Turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi Lemhannas RI Mayjen TNI Kup Yanto Setiono, M.A., Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP., Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. dan jajaran manajemen PT. Bumi Laut Shipping Services.

Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: A. Yudi Hartono Redaktur: Alton Enderwanto Hadi Susanto Penyunting/Editor: Bambang Iman Aryanto

Pembuat Artikel: Naomi Augustina Penerjemah: Dwi Ariyani Desain Grafis: Arini Maulidia Fotografer: Suryadi

Sekretariat: Irmira Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini, Gatot, Ita Puspitasari, Yusnadi

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. (021) 3832108, 3832109 Email. humas.lemhannasri@gmail.com Website <https://www.lemhannas.go.id>

